RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT: STUDI KASUS BALAP LIAR DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TELUK MESJID DESA SARANG BURUNG

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Pada Program Studi Administrasi Publik

OLEH

NUR SYIFA

NPM : 2023148

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA	:	Nur Syifa
NPM	:	2023148
PROGRAM STUDI	:	Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI	:	RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT : STUDI KASUS BALAP LIAR DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TELUK MESJID DESA SARANG BURUNG

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 13 November 2026

Mengetahui
Kaprodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 199211004 201509 021

Menyetujui,
Pembimbing Utama

M Noor Fuadi, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 1152758663200003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat meyelesaikan proposal skripsi yang berjudul " **Responsivitas Pemerintah Desa Terhadap Keluhan Masyarakat: Studi Kasus Balap Liar Dan Kecelakaan lalu Lintas Di jalanTeluk Mesjid Desa Sarang Burung**"

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak M. Noor Fuadi, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Andi Hidayat selaku Kepala Desa Sarang Burung yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian mengenai Responsivitas Pemerintah Desa Sarang Burung Terhadap Keluhan Masyarakat Tentang Balap Liar dan Kecelakaan lalu Lintas.
4. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

5. Warga Desa Sarang Burung dan warga Desa Teluk Mesjid yang memberikan data serta informasinya kepada penulis.
6. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA Amuntai, terima kasih atas proposal skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Sarang Burung, 11 September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Hasil Penelitian Terdahulu 8

B. Tinjauan Teoritis 11

C. Kerangka Pemikiran 15

BAB III METODE PENELITIAN 19

A. Lokasi penelitian 19

B. Pendekatan penelitian 20

C. Tipe Penelitian 21

D. Data dan Sumber Data 22

E. Desain Operasional penelitian 23

F. Teknik Pengumpulan Data 24

G. Teknik Analisis Data 26

H. Uji Kredibilitas Data 29

DAFTAR PUSTAKA 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas, yang dalam bahasa sehari-hari sering disingkat menjadi "laka lantas", merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tiba-tiba, tanpa diduga sebelumnya, dan tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Peristiwa ini pada umumnya melibatkan satu atau lebih kendaraan bermotor, baik yang bertabrakan dengan kendaraan lain, dengan pejalan kaki, dengan hewan, maupun dengan benda-benda yang ada di sekitar jalan seperti pohon, tiang listrik, atau pembatas jalan. Yang menjadi ciri khas dari sebuah kecelakaan lalu lintas adalah unsur ketidaksengajaan tersebut, sehingga kejadian ini berbeda dengan tindakan kriminal yang memang direncanakan atau disengaja untuk mencelakai orang lain menggunakan kendaraan.

Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai penyelenggara pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini seharusnya membuat pemerintah desa lebih cepat tanggap terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan warganya, termasuk persoalan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Salah satu wujud dari kinerja pemerintahan yang baik adalah responsivitas, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut. Ketika pemerintah desa tidak responsif terhadap keluhan warganya, kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa dapat menurun, dan masalah yang sebenarnya bisa dicegah justru berlarut-larut hingga menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Fenomena ini terlihat di jalan Teluk Mesjid desa Sarang Burung. Jalan tersebut hampir setiap sore dijadikan tempat berkumpul dan balapan liar oleh sekelompok anak muda, yang mayoritas bukan berasal dari desa Sarang Burung sendiri, melainkan dari kampung tetangga. Aktivitas balap liar ini bukan hanya mengganggu kenyamanan warga yang melintas atau tinggal di sekitar jalan tersebut, tetapi juga telah beberapa kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini membuat warga merasa resah dan tidak nyaman, terutama karena aktivitas tersebut terjadi secara berulang dan seolah dibiarkan begitu saja.

Jalan Teluk Mesjid desa Sarang Burung ini dibangun pada tahun 2024 oleh TNI yang dikerakkan oleh Ketua DPRD Provinsi, selesai pada tahun 2024 dengan kontruksi cor semen saja dan lanjut tahun 2025 pengaspalan. Pada tahun 2025 belum ada balap liar dikarenakan jalan itu digunakan warga setempat untuk berjualan di sore hari, banyak terlihat warga menjual macam aneka ragam makanan yang diminati remaja. Seiring berjalannya waktu jualan di situ mulai sepi dan para warga yang berdagang mulai berhenti berjualan. Akibatnya, pada sore hari di jalan itu hanya dijadikan remaja tempat berkumpul di pingir jalan.

Tahun 2026 adalah awal terjadinya balap liar karena jalan sepi tidak ada para pedagang dan para TNI sudah meninggalkan kawasan jalan itu jadi remaja di sana mulai berani berkendaraan kencang sampai balap liar yang

sangat membuat warga resah. Menurut data yang penulis kutip pada tahun 2026, sudah ada 5 orang korban laka lantas, dari terserempet sampai luka-luka ringan.

Warga sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan keluhan mengenai persoalan ini, baik secara langsung maupun melalui media sosial, karena masyarakat sudah merasa tidak tahan dengan gangguan yang terus berulang. Namun, respons dari pihak-pihak terkait, termasuk aparatur pemerintah desa setempat, dinilai belum sebanding dengan tingkat keresahan yang dirasakan warga. Bahkan dari sisi penegakan hukum, laporan warga kepada Polsek Danau Panggang juga tidak segera direspons, dan tindakan konkret baru terlihat setelah adanya kunjungan Kapolres Hulu Sungai Utara Amuntai ke wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah desa telah menjalankan fungsinya secara responsif dalam menyikapi keluhan masyarakat, khususnya terkait persoalan balap liar dan kecelakaan lalu lintas di Jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung.

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan ini bukan sekadar gangguan ketertiban biasa, melainkan sudah menyangkut keselamatan warga akibat kecelakaan yang terjadi berulang kali. Di sisi lain, penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak aparatur desa, melainkan untuk memahami secara objektif bagaimana proses penanganan keluhan ini berjalan, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa, dan bagaimana seharusnya respons ideal yang dapat diberikan agar keresahan masyarakat dapat segera teratasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Kantor Desa Sarang Burung Kecamatan Danau Panggang:

1. Lambatnya kecepatan menanggapi laporan

   Soal kecepatan menanggapi laporan kepala desa dan perangkatnya tidak langsung bergerak begitu ada laporan dari warga tentang balap liar atau kecelakaan, justru laporan itu didiamkan dulu dan baru direspons setelah berulang kali disampaikan.

2. Ketidak hadiran langsung di lokasi

   Kepala desa atau perangkat jarang benar-benar turun ke Jalan Teluk Mesjid untuk melihat kondisi sebenarnya, selama ini hanya menerima laporan dari balik meja kantor desa tanpa pernah meninjau langsung.

3. Kurangnya keterbukaan komunikasi dengan warga

   Warga merasa sulit menemui atau menghubungi kepala desa dan aparat desa untuk menyampaikan keluhan dan mendapat penjelasan, sehingga akhirnya memilih menyuarakan keluhan lewat media sosial.

4. Tidak ada tindakan lanjut yang nyata

   Setelah keluhan diterima, tidak ada langkah konkret yang dilakukan, misalnya mengirim surat resmi ke pihak kepolisian, mengadakan musyawarah desa, atau memasang rambu peringatan, atau justru laporan tersebut berhenti begitu saja setelah diterima tanpa ada kelanjutan.

5. Kurangnya koordinasi dengan pihak berwenang

   Kepala desa dan aparat desa tidak mendorong dan mengawal agar Polsek Danau Panggang segera bertindak, justru persoalan ini diserahkan begitu saja tanpa ada pengawalan dari pihak desa.

6. Belum adanya inisiatif pencegahan

   Kepala desa dan aparat desa belum mengambil langkah sebelum masalah makin parah, seperti imbauan kepada warga atau musyawarah bersama, justru desa baru bergerak setelah ada tekanan dari luar, seperti setelah kunjungan Kapolres Amuntai ke lokasi.

Menurut data dari Gardu Amuntai, pada tanggal 7 Agustus 2026 Personel Satlantas Polres HSU bersama Personel Satsamapta dan Polsek Danau Panggang yang dipimpin langsung oleh Wakapolres HSU melaksanakan penertiban balap liar. Tindakan yang diambil yaitu pengamanan kendaraan yang terjaring ke Polres HSU, kemudian diminta bagi yang ingin mengambil kendaraan untuk melengkapi kendaraannya baik itu surat administrasi kendaraan, pergantian knalpot brong serta kelengkapan kendaraan yang sebelumnya sudah dilepas (dipreteli).

Berdasarkan fenomena tersebut oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "**RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT: STUDI KASUS BALAP LIAR DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TELUK MESJID DESA SARANG BURUNG".**

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas yang berkaitan pada responsivitas pemerintah Desa Sarang Burung terhadap balap liar dan kecelakaan lalu lintas, maka masalah

penelitian ini dibatasi menggunakan teori Agus Dwiyanto (2014: 414) ada 5 sub variabel tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Keluhan Masyarakat.
2. Sikap aparat merespons keluhan.
3. Keluhan sebagai bahan perbaikan.
4. Tindakan nyata pemerintah desa.
5. Perlakuan terhadap warga pelapor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana responsivitas pemerintah d esa terhadap keluhan masyarakat: studi kasus balap liar dan kecelakaan lalu lintas di jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat responsivitas pemerintah Desa terhadap keluhan masyarakat: studi kasus balap liar dan kecelakaan lalu lintas di jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui responsivitas pemerintah Desa terhadap keluhan masyarakat: studi kasus balap liar dan kecelakaan lalu lintas di jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat responsivitas pemerintah Desa terhadap keluhan masyarakat: studi kasus balap liar dan kecelakaan lalu lintas di jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan konsep responsivitas pemerintah desa dalam merespons keluhan dan aspirasi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kepekaan dan kecepatan tanggap terhadap keluhan masyarakat.
   b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi secara akademis mengenai persoalan yang selama ini dirasakan.
   c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dengan konteks atau lokasi yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

1. Nugroho (2020: 77-93) dengan judul "**Analisis Responsivitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat**." yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini secara khusus menganalisis sejauh mana aparatur pemerintah desa mampu bersikap responsif dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakatnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama berfokus pada responsivitas aparatur pemerintah desa, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam membangun kerangka analisis, dan perbedaannya penelitian Nugroho Bersifat lebih umum atau luas, yaitu mencakup berbagai permasalahan masyarakat desa secara garis besar dan penelitian penulis Bersifat spesifik (*case study*), berfokus pada dua isu konkrit: balap liar dan kecelakaan lalu lintas.

2. Karmelia, Maulia, & Utami (2025:596–608) yang berjudul "**Analisis Penanggulangan Balap Liar di Kalangan Remaja oleh Pemerintah Desa Sipin Teluk Duren**." Penelitian ini menyimpulkan bahwa Upaya pemerintah desa memberi himbauan dan mendokumentasikan kejadian balap liar sudah ada, tetapi jangkauan informasinya terbatas karena tidak semua warga mengikuti kanal media sosial desa, partisipasi warga dalam pengawasan dan pelaporan masih rendah akibat kurangnya sosialisasi mekanisme pelaporan dan minimnya transparansi desa dalam menangani aduan. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti efektivitas komunikasi publik, penanganan keluhan warga, serta aspek pengawasan masyarakat terhadap gangguan ketertiban publik di wilayah desa. Sedangkan perbedaaannya, Karmelia, dkk. menggunakan sudut pandang penanggulangan upaya pencegahan, sosialisasi, dan penindakan balap liar, sedangkan Penelitian penulis Menggunakan sudut pandang responsivitas kecepatan, tanggap atau tidaknya, dan kepekaan pemerintah desa dalam merespons keluhan warga.
3. Fathurrahman & Hakim (2025: 1–8) dengan judul "**Tingkat Responsivitas Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik: Studi Kuantitatif di Desa Gerung Selatan, Kabupaten Lombok Barat.**" yang dimuat dalam Perseptif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume 3 Nomor 1. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat responsivitas aparatur desa secara umum tergolong baik, namun aspek ketepatan waktu pelayanan dan tindak lanjut atas keluhan masyarakat masih menjadi titik lemah karena belum didukung mekanisme

pengaduan yang terstruktur. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan indikator responsivitas untuk mengukur dan menilai kinerja aparatur pemerintah desa, khususnya dalam hal kemampuan dan kepekaan menindak lanjuti pengaduan atau keluhan masyarakat. Perbedaannya Fathurrahman dan Hakim Menggunakan pendekatan kuantitatif, mengukur tingkat responsivitas menggunakan angka atau skala pengukuran kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang mendalami secara komprehensif latar belakang, proses, dan bentuk respons pemerintah desa.

4. Afrilla & Alhadi (2024: 1–9) dengan judul "**Responsivitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi**." yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Volume 5 Nomor 2. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah pengaduan resmi yang masuk relatif sedikit dan terus menurun, salah satunya karena belum tersedianya sarana pengaduan yang memadai bagi masyarakat. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai indikator responsivitas, sekaligus menjadi pembanding mengenai pentingnya saluran pengaduan yang jelas. Persamaannya penelitian sama-sama menjadikan pengelolaan pengaduan atau keluhan masyarakat sebagai indikator utama untuk mengukur dan menilai responsivitas instansi atau aparatur pemerintah. Perbedaannya Afrilla dan Alhadi mengangkat

persoalan minimnya jumlah pengaduan resmi akibat belum tersedianya sarana pengaduan formal pada instansi dinas. Sedangkan penelitian penulis Mengangkat responsivitas pemerintah desa terhadap isu ketertiban publik (*public safety*) yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari di lapangan.

5. Auliasari & Lukitasari (2022: 177-185) dengan judul "**Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Magetan**. " Dimuat dalam Recidive. Penelitian yuridis empiris ini menjelaskan bahwa balap liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu menilai patroli lalu lintas yang dilakukan Polres Magetan. Patroli dinilai belum efektif karena pelaku sudah mengetahui jadwalnya, sehingga warga masih mengeluhkan kebisingan knalpot. Laporan warga juga menjadi salah satu sumber informasi bagi polisi untuk bergerak. Persamaannya dengan penelitian penulis ada pada topik balap liar dan keresahan warga yang melapor. Perbedaannya, penelitian tersebut menyoroti aspek hukum dan kinerja kepolisian, sedangkan penelitian penulis melihat sejauh mana pemerintah desa merespons keluhan warga. Artikel ini juga membantu penulis memahami bahwa aparat kepolisian memegang tanggung jawab memberantas balap liar, sehingga koordinasi pemerintah desa dengan polisi ikut menjadi bahan penilaian.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Jamaluddin, (2023: 4-5) dalam bukunya yang membahas mengenai hukum pemerintahan desa, desa didefinisikan sebagai Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian tersebut selaras dengan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi payung hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa atau sebutan lain, seperti petinggi atau Pambakal sesuai adat setempat, dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi ujung tombak pertama yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan yang dialami warganya sehari-hari, termasuk persoalan sosial seperti balap liar dan kecelakaan lalu lintas di lingkungan desa.

Menurut Widjaja (2014:3), dengan judul "**Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**". Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Nomor 3, yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Menurut Hanif Nurcholis (2011:3) dalam buku "**Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**." Nurcholis menekankan bahwa pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada level paling bawah dalam sistem administrasi negara, yang idealnya menjalankan harmonisasi antara sistem pemerintahan tradisional yang bersendikan adat istiadat dengan sistem pemerintahan nasional. Ia juga menyoroti bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa perlu terus diperkuat kapasitasnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

b. Konsep Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto (2014: 414), “responsivitas adalah kemampuan organisasi birokrasi publik untuk mengidentifikasi dan mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”

Secara singkat, responsivitas mengukur keselarasan (*alignment*) antara program atau layanan yang diberikan oleh birokrasi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Responsivitas yang rendah ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara pelayanan yang disediakan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, responsivitas juga dipahami sebagai konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, sehingga birokrasi harus merespons secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan.

1) **Keluhan pengguna layanan**: banyak sedikitnya keluhan masyarakat yang diterima mencerminkan seberapa cepat aparat

birokrasi merespons dalam menangani masalah pelayanan. Dalam konteks penelitian ini, indikator ini digunakan untuk melihat bagaimana keluhan warga soal balap liar dan kecelakaan di Jalan Teluk Mesjid diterima dan dicatat oleh pemerintah desa.

2) **Sikap aparat birokrasi dalam merespons keluhan**: kesigapan, kejelasan, dan ketepatan sikap perangkat desa saat menerima dan menindaklanjuti laporan warga.
3) **Penggunaan keluhan sebagai referensi perbaikan pelayanan di masa mendatang:** apakah aduan warga dijadikan dasar bagi desa untuk mengambil kebijakan atau tindakan pencegahan lanjutan (misalnya koordinasi dengan pihak kepolisian atau pemasangan rambu).
4) **Tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan:** langkah konkret yang diambil pemerintah desa, baik berupa imbauan, patroli, koordinasi lintas lembaga, maupun kebijakan lain.
5) **Penempatan pengguna layanan dalam sistem pelayanan yang berlaku:** sejauh mana warga pelapor dilibatkan atau diberi informasi lanjutan atas laporan yang mereka sampaikan.

Alasan penulis menggunakan teori ini adalah karna dapat langsung diturunkan menjadi pedoman wawancara dan observasi. Kelima indikator tersebut bersifat konkret dan dapat langsung dioperasionalkan menjadi pertanyaan penelitian di lapangan misalnya menanyakan langsung kepada perangkat desa, "Apakah

ada catatan keluhan warga soal balap liar?", "Bagaimana sikap Bapak/Ibu saat pertama kali menerima keluhan itu?", dan seterusnya. Ini memudahkan penulis menyusun instrumen penelitian kualitatif tanpa perlu banyak modifikasi teori.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual pada penelitian ini dibutuhkan, guna menjadi alur berpikir dan juga menjadi landasan untuk menyusun hipotesis pada penelitian. Pengerjaan kerangka konseptual dapat memudahkan para pembaca agar bisa memahami permasalahan pokok yang terdapat di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bermula dari persoalan yang cukup meresahkan warga di jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung, yaitu aksi balap liar yang terjadi hampir setiap sore atau malam. Tidak hanya menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan, kegiatan ini juga sudah beberapa kali memicu kecelakaan lalu lintas, baik yang menimpa pelakunya sendiri maupun pengguna jalan lain yang kebetulan lewat. Karena sudah terlalu sering dan tidak kunjung reda, sebagian warga akhirnya mengadu, ada yang langsung menyampaikan ke aparat desa, ada juga yang meluapkan keresahannya lewat media sosial karena merasa keluhan lisan saja tidak cukup didengar.

Dari situ muncul pertanyaan yang ingin dijawab lewat penelitian ini: seberapa jauh sebenarnya pemerintah desa menanggapi keluhan-keluhan tersebut? Apakah cepat ditindak lanjuti, atau justru dibiarkan berlarut-larut sampai kecelakaan terus berulang? Untuk menjawab itu, peneliti memakai teori responsivitas dari Agus Dwiyanto (2014: 414) sebagai alat bantu

analisis, karena teori ini memang dibuat untuk melihat seberapa tanggap birokrasi pemerintah dalam menangkap keluhan warga dan mengubahnya jadi tindakan nyata.

Ada lima hal yang akan dilihat lewat teori ini. *Pertama*, apakah ada keluhan dari warga dan bagaimana keluhan itu sampai ke pemerintah desa. *Kedua*, bagaimana sikap aparat desa saat menerima keluhan tersebut, apakah tanggap dan terbuka, atau malah terkesan acuh tak acuh dan lambat. *Ketiga*, apakah keluhan warga benar-benar dijadikan pertimbangan untuk mengambil langkah selanjutnya, misalnya berkoordinasi dengan polisi atau membuat kebijakan baru soal ketertiban jalan. *Keempat*, tindakan apa saja yang benar-benar dilakukan pemerintah desa untuk merespons keluhan itu, bukan cuma janji, tapi aksi konkret seperti imbauan, patroli, atau pemasangan rambu. *Kelima*, bagaimana warga yang mengadu diperlakukan setelahnya, apakah mereka diberikan informasi mengenai tindak lanjut laporannya atau justru tidak ada kabar sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran itu, peneliti akan turun langsung ke lapangan, mewawancarai aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang pernah mengadu soal balap liar ini. Data yang terkumpul lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif, supaya bisa terlihat dengan jelas seperti apa sebenarnya respons pemerintah desa selama ini, dan apa saja yang membuat penanganannya lancar atau justru tersendat.

Harapannya, hasil penelitian ini bisa memberi gambaran yang jujur soal sejauh mana pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya, sekaligus jadi bahan masukan supaya ke depannya keluhan warga soal balap liar dan

kecelakaan di jalan ini bisa direspons lebih cepat dan serius, bukan dibiarkan sampai jatuh korban lagi.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pemerintahan desa yang membawahi ruas Jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung, yang menjadi lokasi terjadinya aktivitas balap liar dan kecelakaan lalu lintas yang meresahkan masyarakat Sarang Burung. Lokasi penelitian secara spesifik meliputi kantor pemerintah desa setempat sebagai unit analisis utama, serta ruas Jalan Teluk Mesjid menuju Sarang Burung sebagai lokasi fisik yang menjadi objek keluhan masyarakat.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, ruas jalan tersebut merupakan titik yang kerap dijadikan arena balap liar oleh sebagian pemuda, terutama pada malam hari, sehingga menimbulkan gangguan ketertiban dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lain. *Kedua*, keluhan masyarakat atas kondisi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah desa, sehingga lokasi ini relevan untuk mengkaji sejauh mana pemerintah desa merespons aspirasi dan keluhan warganya. *Ketiga*, peneliti memiliki akses terhadap lokasi ini, baik dari sisi kedekatan wilayah maupun kemudahan dalam menjangkau perangkat desa dan warga sekitar sebagai informan penelitian.

Dengan lokasi penelitian tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana pemerintah desa merespons keluhan masyarakat, langkah-langkah yang telah maupun belum diambil, serta

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMONTAI

kendala yang dihadapi dalam menangani persoalan balap liar dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji, yaitu responsivitas pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat atas balap liar dan kecelakaan lalu lintas, memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan, bukan sekadar mengukur secara angka atau statistik.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam mengenai persepsi, sikap, dan tindakan nyata pemerintah desa dalam merespons keluhan masyarakat, sekaligus memahami konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya persoalan balap liar dan kecelakaan lalu lintas di Jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, pernyataan, dan gambaran situasi dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana responsivitas pemerintah desa berjalan dalam praktiknya.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena tujuan penelitian ini adalah memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki, tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai tingkat responsivitas pemerintah desa terhadap

keluhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat responsivitas tersebut.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian untuk memperoleh data primer dari sumber-sumbernya. Peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini pemerintah desa serta masyarakat di sekitar Jalan Teluk Mesjid Desa Sarang Burung, guna mengamati, menggali, dan mengumpulkan informasi mengenai responsivitas pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat atas balap liar dan kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh di lapangan disajikan dan dipaparkan apa adanya sesuai fakta yang ditemukan, tanpa manipulasi atau perlakuan khusus terhadap objek penelitian. Peneliti berupaya menggambarkan secara rinci bagaimana proses respons pemerintah desa berlangsung, mulai dari penerimaan keluhan, penanganan, hingga tindak lanjut yang dilakukan, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

Dengan tipe penelitian ini, peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi yang berlaku luas, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kasus spesifik yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara kontekstual dan mendetail.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

   a. Data Primer

      Menurut Sugiyono (2018: 225), “data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Adapun data primer yang penulis ambil adalah melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan.

   b. Data Skunder

      Menurut Sugiyono (2018: 225), “data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.” Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Adapun data-data sekunder yang dikumpulkan penulis adalah buku-buku dan dokumen.

2. Sumber Data

   Menurut Sugiyono (2020: 213) dalam bukunya **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Sugiyono menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian adalah “Subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.”

   Sumber data juga berarti subjek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang-orang yang benar-benar paham dan dianggap mengetahui dengan baik tentang masalah yang diteliti, jadi informan dapat memberikan informasi yang diperlukan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci atau informan awal dipilih secara bertujuan, purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, sedangkan selanjutnya ditentukan dengan cara snowball sampling yaitu dipilih secara bergulir sampai menunjukan tingkat kejenuhan informasi.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian yang menjadi sumber data adalah:

Tabel 3. 1

Informan

No	Informan	Jumlah
1	Aparat Desa	5 Orang
2	Masyarakat	5 Orang
3	Polres Danau Panggang	1 orang

Sumber : dibuat oleh Peneliti Tahun 2026

E. Desain Oprasional penelitian

Menurut Agus Dwiyanto (2014: 414), responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari definisi ini, Agus Dwiyanto kemudian menurunkan lima indikator yang bisa dipakai untuk mengukur seberapa responsif sebuah instansi pemerintah, yaitu: keluhan pengguna layanan, sikap aparat dalam merespons keluhan, keluhan sebagai referensi perbaikan pelayanan, tindakan nyata aparat, dan penempatan pengguna layanan dalam sistem pelayanan yang berlaku.

1. Keluhan Masyarakat

2. Sikap aparat merespons keluhan
3. Keluhan sebagai bahan perbaikan
4. Tindakan nyata pemerintah desa
5. Perlakuan terhadap warga pelapor

Desain operasional penelitian Respon pemerintah Desa di Desa Sarang Burung Kecamatan Danau panggang berikut:

Tabel 3. 2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang lingkup variabel	Indikator
Responsivitas Pemerintah Desa menurut Agus Dwiyanto (2014: 414)	1. Keluhan masyarakat	a. Ada tidaknya keluhan warga terkait balap liar dan kecelakaan b. Cara penyampaian keluhan warga (desa, BPD, atau medsos)
	2. Sikap aparat merespons keluhan	a. Reaksi dan sikap aparat desa saat menerima laporan b. Kecepatan waktu aparat desa dalam merespons keluhan
	3. Keluhan sebagai bahan perbaikan	a. Pemanfaatan keluhan warga untuk mengambil langkah lanjutan b. Adanya rapat, kebijakan, atau koordinasi tindak lanjut
	4. Tindakan nyata pemerintah desa	a. Langkah konkret penanganan balap liar di lapangan b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan (rambu, penerangan, patroli)
	5. Perlakuan terhadap warga pelapor	a. Penyampaian kabar lanjutan mengenai perkembangan laporan b. Keterbukaan komunikasi aparat terhadap warga pelapor

Sumber: dibuat oleh peneliti Tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Menurut Nasution (Sugiyono, 2018:226) pengertian observasi sebagai berikut: "observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran."

2. Wawancara

   Esterberg dalam (Sugiyono, 2018:231) mendefinisikan wawancara sebagai berikut:

   Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

   Jadi melalui wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

   Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

G. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifiying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman, dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut.

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

   Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 10), “dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip.” Dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

   a. Pemilihan (*Selecting*)

      Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:18), “peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana

yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis."

b. Pengerucutan (*Focusing*)

Miles, Huberman, dan Saldana (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

c. Peringkasan (*Abstracting*)

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data.

d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data *Simplifying and Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Penyajian Data

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles, Huberman, dan Saldana (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*):

responsivitas pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat atas balap liar dan kecelakaan lalu lintas di Jalan Teluk Mesjid menuju

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Sarang Burung masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari lambatnya respons pemerintah desa dalam menanggapi keluhan yang telah disampaikan warga secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga masyarakat akhirnya mengambil inisiatif sendiri untuk menyuarakan keresahannya secara lebih luas hingga menarik perhatian pihak luar. Tindak lanjut yang nyata terhadap persoalan ini justru baru muncul setelah adanya kunjungan Kapolres Amuntai, bukan atas inisiatif proaktif dari pemerintah desa maupun Polres Danau Panggang, yang menunjukkan bahwa respons yang terjadi lebih bersifat reaktif dan dipicu oleh tekanan eksternal, bukan hasil dari mekanisme responsivitas yang berjalan dengan baik di tingkat desa.

Rendahnya responsivitas tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, di antaranya keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam menindak langsung pelaku balap liar karena persoalan ini termasuk ranah penegakan hukum lalu lintas yang menjadi tanggung jawab kepolisian, lemahnya koordinasi lintas wilayah mengingat pelaku balap liar berasal dari kampung tetangga dan bukan warga Sarang Burung sendiri, serta minimnya inisiatif komunikasi antara aparat desa dengan pihak kepolisian setempat. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat, yaitu keresahan yang berkepanjangan, berulangnya kejadian kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut, serta menurunnya kepercayaan warga terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menangani persoalan yang berdampak langsung pada keselamatan mereka.

Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari warga, aparat desa, dan pihak terkait lainnya, serta mencocokkannya dengan dokumentasi atau laporan yang tersedia, sehingga temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi responsivitas pemerintah desa yang sesungguhnya dan bukan sekadar persepsi sepihak dari satu sumber data saja.

H. Uji Kredibilitas Data

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif, adalah tingkat ukuran suatu kebenaran atas data yang telah dikumpulkan atau derajat kepercayaan data dan kecocokan data antara konsep penelitian dengan hasil penelitian. Uji kredibilitas ini bisa dilakukan dengan jalan diskusi dan observasi. Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat ujian keabsahan data sebagaimana disimpulkan salah satunya uji kredibilitas. Uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, penggunaan bahan referensi, dan *member check*. (Sugiyono, 2018: 270-276).

1. Perpanjangan Pengamatan

   Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.
2. Peningkatan Ketekunan

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

kepastian data dari urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercayai atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat trianggulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan trianggulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

4. Diskusi Dengan Teman Sejawat dan Menggunakan Bahan Referensi:

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat yang memiliki pengetahuan di bidang Administrasi Publik maupun metodologi penelitian kualitatif, sehingga peneliti mendapatkan masukan serta kritik yang objektif. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan referensi. Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

5. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangi, supaya lebih otentik, selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan member check.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

Afrilla, & Alhadi. (2024). Responsivitas aparatur dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–9.

Auliasari, & Lukitasari. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive*, 177–185.

Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fathurrahman, & Hakim. (2025). Tingkat responsivitas aparatur desa dalam pelayanan publik: Studi kuantitatif di Desa Gerung Selatan, Kabupaten Lombok Barat. *Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1–8.

Ismail, A., Nurlaila, N., & Kasim, M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 2(3), 380–392. https://doi.org/10.35965/jae.v2i3.613

Jamaluddin. (2023). *Hukum pemerintahan desa*. Yogyakarta: Deepublish.

Karmelia, Maulia, & Utami. (2025). Analisis penanggulangan balap liar di kalangan remaja oleh Pemerintah Desa Sipin Teluk Duren. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 596–608.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nugroho. (2020). Analisis responsivitas aparatur pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 77–93.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, H. A. W. (2014). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.